

**LEMBAR JAWABAN
ANALISIS KASUS**

Nomor Assessee : 01
Nama Assessee : Muhammad Irfan Sadli S.E.
Tanggal : 9 Februari 2022

MEMINIMALISIR KEBOCORAN DATA KEPENDUDUKAN**I. Pendahuluan.**

Kebocoran data penduduk akhir-akhir ini semakin marak yang merupakan imbas dari peningkatan teknologi informasi dalam keseharian masyarakat. Persyaratan untuk mengakses urusan layanan publik yang mengharuskan masyarakat terpaksa memberikan data pribadi kependudukan menjadi salah satu penyebabnya. Terjadinya kebocoran data kependudukan ini tentu sangat merugikan masyarakat. Banyak sekali aduan dari masyarakat tentang data kependudukan mereka yang disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

II. Permasalahan:

Bagaimana meminimalisir kebocoran data penduduk yang bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu?

III. Hal-hal yang disarankan kepada masyarakat:

- Jangan terlalu gampang memberikan data diri kepada pihak-pihak yang tidak jelas seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), No. HP, No.NPWP, eMail, dll. Karena dikhawatirkan hal ini akan disalahgunakan oleh oknum tersebut.
- Menyimpan secara baik data diri kependudukan dan jangan dipublikasikan di media sosial.

IV. Saran Inovasi ke depan:

- Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri beserta pihak-pihak terkait harus bisa merancang tata kelola data kependudukan yang lebih baik dan sistematis dengan menggunakan satu kartu untuk semua urusan dan jangan terlalu banyak jenis-jenis kartu kependudukan yang justru berpotensi mengalami kebocoran data.

- Satu Nomor Induk Kependudukan seyogyanya bisa digunakan untuk segala jenis urusan publik dalam bidang keuangan, pendidikan, kesehatan dan urusan lainnya.

V. Kesimpulan dan Saran

- Masyarakat harus memprivasi data kependukannya dan jangan gampang memberikan data kepada pihak-pihak yang tidak jelas.
- Dalam urusan pelayanan publik ke depannya sudah menerapkan *papperless*, sehingga tidak harus menyerahkan fotocopy identitas, tapi cukup dengan scan ID (Satu Kartu untuk semua)